

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pamekasan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya di kawasan rawan bencana, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dan belum adanya mekanisme pengaturan yang operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan rawan bencana Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus melalui wawancara dengan instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersifat koordinatif dan persuasif tanpa didukung kewenangan penindakan administratif, serta belum memiliki sistem pengawasan yang terstruktur dan berbasis data. Sementara itu, penegakan hukum belum efektif karena kewenangan utama berada pada pemerintah provinsi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat dan lemahnya koordinasi antarinstansi turut menjadi hambatan.

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat kekosongan pengaturan yang bersifat operasional serta keterbatasan kewenangan daerah yang menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah menyusun regulasi teknis pengawasan yang terintegrasi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum guna meningkatkan efektivitas penanganan tambang ilegal.

Kata kunci: aktivitas tambang ilegal, kawasan rawan bencana, penataan ruang, pengawasan.

ABSTRACT

The background of this research is the proliferation of illegal mining activities in Pamekasan Regency, which has caused environmental damage, particularly in disaster-prone areas, along with the suboptimal supervision and law enforcement by the local government. This problem is further compounded by the limited authority of the regency government and the absence of an operational regulatory mechanism. This study aims to analyze the implementation of supervision and law enforcement against illegal mining activities in disaster-prone areas of Pamekasan Regency. The research method employed is empirical juridical with a statutory regulation approach and a case study approach through interviews with relevant agencies.

The findings reveal that supervision conducted by the regency government is coordinative and persuasive in nature, unsupported by administrative enforcement authority, and lacks a structured, data-based monitoring system. Meanwhile, law enforcement has not been effective, as primary authority rests with the provincial government, creating a gap between legal norms and field practice. Additionally, the socio-economic conditions of the community and weak inter-agency coordination serve as further obstacles.

The study concludes that there is a void in operational regulations and limitations in regional authority, which has rendered supervision and law enforcement suboptimal. Therefore, it is recommended that the local government formulate integrated technical supervisory regulations and strengthen coordination with the provincial government and law enforcement agencies to improve the effectiveness of illegal mining management.

Keywords: *illegal mining activities, disaster-prone areas, spatial planning, supervision.*